## Draft Uji Konsekuensi Tahun 2018

		The second second second second				10
		Informasi		Konsekuensi/F	ertimbangan	Jangka
		(berisi informas	Dasar Hukum	Bagi Publik (b	erisi uraian	Waktu
	No	tertentu yang aka	an Pengecualian	koneskuensi/pertimbangan)		(Disebutkan
		dikecualikan)	Informasi			Jangka
			1	Dibuka	Ditutup	Waktunya)
	1	Dokumen Pro		Ti mana	-Menjaga aku	Terbatas
		Perencanaan (Desa		proses analisis	rasi dan	sampai dengan
		Bidang Sumber Daya (SDA) Dan Kelengkap	PRODUCT TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	dan perencanaan (desain) Bidang	obyektifitas pro ses perenca	selesainya Do kumen proses
		Penunjangnya.	an Informasi Publik		naan (desain) Bi	perencanaan
			(KIP)		dang SDA	(desain) Bidang
			-Perpres No. 36	-Dapat menggang	-Menghindari	SDA.
			Tahun 2005 tentang		timbulnya para	
			Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan	daan tanah.	spekulan tanah	
			Pembangunan			
			untuk Kepentingan			
			Umum			
			sebagaimana telah			
			diubah dengan Perpres Nomor 65			
			Tahun 2006 tentang			
1			Peruhahan Pernres			
		Informasi	9	Konsekuensi/	Pertimbangan	Jangka
		(berisi informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Bagi Publik (	The second second	Waktu
	No	10.00	Dasar Hukum Pengecualian	The SAN SHEET SAN SHOW WAS	berisi uraian	
	No	(berisi informasi	Dasar Hukum	Bagi Publik ( konsekuensi/p	berisi uraian pertimbangan)	Waktu
		(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Bagi Publik ( konsekuensi/p	berisi uraian pertimbangan) Ditutup	Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
	No 2	(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi - UU No. 26 Tahun 2007	Bagi Publik ( konsekuensi/p Dibuka	berisi uraian pertimbangan) Ditutup	Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) Dokumen Proses Review Perda RTRW	Dasar Hukum Pengecualian Informasi - UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan	Bagi Publik (I konsekuensi/p Dibuka  Terhambatnya proses Review	berisi uraian pertimbangan) Ditutup - Menjaga obyektifitas	Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya) Terbatas sampai dengan
		(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) Dokumen Proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota	Dasar Hukum Pengecualian Informasi - UU No. 26 Tahun 2007	Bagi Publik (konsekuensi/p Dibuka  Terhambatnya proses Review Perda RTRW	berisi uraian pertimbangan) Ditutup	Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) Dokumen Proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota	Dasar Hukum Pengecualian Informasi  UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Bagi Publik (konsekuensi/p Dibuka  Terhambatnya proses Review Perda RTRW	berisi uraian pertimbangan)  Ditutup  Menjaga obyektifitas proses Review	Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya) Terbatas sampai dengan disahkannya
		(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)  Dokumen Proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota Dan Kelengkapan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi  UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - UU. No. 14 tahun 2008	Bagi Publik (I konsekuensi/p Dibuka  Terhambatnya proses Review Perda RTRW Provinsi,	Ditutup  - Menjaga obyektifitas proses Review Perda RTRW	Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya) Terbatas sampai dengan disahkannya Review Perda
		(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)  Dokumen Proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota Dan Kelengkapan Pendukungnya.	Dasar Hukum Pengecualian Informasi  UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU. No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Bagi Publik (konsekuensi/p Dibuka  Terhambatnya proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota	Ditutup  - Menjaga obyektifitas proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota	Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya) Terbatas sampai dengan disahkannya Review Perda RTRW Provinsi,
		(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)  Dokumen Proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota Dan Kelengkapan Pendukungnya.	Dasar Hukum Pengecualian Informasi  UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - UU. No. 14 tahun 2008	Bagi Publik (I konsekuensi/p  Dibuka  Terhambatnya proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota	Ditutup  - Menjaga obyektifitas proses Review Perda RTRW Provinsi,	Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya) Terbatas sampai dengan disahkannya Review Perda RTRW Provinsi,
		(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)  Dokumen Proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota Dan Kelengkapan Pendukungnya.	Dasar Hukum Pengecualian Informasi  UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU. No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Bagi Publik (I konsekuensi/p  Dibuka  - Terhambatnya proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota  - Terhambatnya Proses Pemba	Ditutup  - Menjaga obyektifitas proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota  -Proses Pemba hasan Raperda	Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya) Terbatas sampai dengan disahkannya Review Perda RTRW Provinsi,
		(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)  Dokumen Proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota Dan Kelengkapan Pendukungnya.	Dasar Hukum Pengecualian Informasi  UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU. No. 14 tahun 2008 tentang KIP  UU. No. 11 tahun 2011 tentang Pembentukan	Bagi Publik (I konsekuensi/p  Dibuka  - Terhambatnya proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota  - Terhambatnya Proses Pemba hasan Raperda bersama Legis	Ditutup  - Menjaga obyektifitas proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota  -Proses Pemba hasan Raperda dapat berjalan lancar dan	Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya) Terbatas sampai dengan disahkannya Review Perda RTRW Provinsi,
		(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)  Dokumen Proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota Dan Kelengkapan Pendukungnya.	Dasar Hukum Pengecualian Informasi  UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU. No. 14 tahun 2008 tentang KIP  UU. No. 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-	Bagi Publik (I konsekuensi/p  Dibuka  - Terhambatnya proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota  - Terhambatnya Proses Pemba hasan Raperda	Ditutup  - Menjaga obyektifitas proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota  -Proses Pemba hasan Raperda dapat berjalan	Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya) Terbatas sampai dengan disahkannya Review Perda RTRW Provinsi,
		(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)  Dokumen Proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota Dan Kelengkapan Pendukungnya.	Dasar Hukum Pengecualian Informasi  UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU. No. 14 tahun 2008 tentang KIP  UU. No. 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-	Bagi Publik (I konsekuensi/p  Dibuka  - Terhambatnya proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota  - Terhambatnya Proses Pemba hasan Raperda bersama Legis	Ditutup  - Menjaga obyektifitas proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota  -Proses Pemba hasan Raperda dapat berjalan lancar dan	Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya) Terbatas sampai dengan disahkannya Review Perda RTRW Provinsi,
		(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)  Dokumen Proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota Dan Kelengkapan Pendukungnya.	Dasar Hukum Pengecualian Informasi  UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU. No. 14 tahun 2008 tentang KIP  UU. No. 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-	Bagi Publik (I konsekuensi/p  Dibuka  - Terhambatnya proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota  - Terhambatnya Proses Pemba hasan Raperda bersama Legis	Ditutup  - Menjaga obyektifitas proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota  -Proses Pemba hasan Raperda dapat berjalan lancar dan	Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya) Terbatas sampai dengan disahkannya Review Perda RTRW Provinsi,
		(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)  Dokumen Proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota Dan Kelengkapan Pendukungnya.	Dasar Hukum Pengecualian Informasi  UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU. No. 14 tahun 2008 tentang KIP  UU. No. 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-	Bagi Publik (I konsekuensi/p  Dibuka  - Terhambatnya proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota  - Terhambatnya Proses Pemba hasan Raperda bersama Legis	Ditutup  - Menjaga obyektifitas proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota  -Proses Pemba hasan Raperda dapat berjalan lancar dan	Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya) Terbatas sampai dengan disahkannya Review Perda RTRW Provinsi,